

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan perkembangan perekonomian yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan majunya sistem informasi yang bergerak cepat. Dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi, dan laju pembangunan Indonesia yang setiap tahun mengalami peningkatan yang bersamaan dengan bertambahnya sarana prasarana untuk menunjang tercapainya kemakmuran bagi penduduk Indonesia.

Perekonomian bangsa Indonesia yang semakin maju merupakan peran dari masyarakat yang telah melakukan berbagai usaha di bidang bisnis dan perekonomian di lingkup usaha yang besar, menengah maupun kecil. Perekonomian adalah upaya untuk pemberdayaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (CIA World Factbook, 2016). Bangsa Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia karena terletak di kondisi geografis yang strategis dan memiliki jumlah kekayaan alam yang melimpah. Keadaan ini menarik sehingga membuat para pengusaha ingin mendirikan usaha di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri karena melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Salah satu jenis usaha yang memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan manufaktur nasional di tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman. Menurut Menperin pada triwulan III tahun 2017, beberapa subsektor tersebut kinerjanya di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri logam dasar sebesar 10,60 persen, industri makanan dan minuman 9,49 persen, serta industri alat transportasi 5,63 persen. Menperin

meyakini, sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III/2017 dengan mencapai 17,76 persen. Sedangkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan III/2017 sebesar 5,49 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen.

Pertumbuhan industri yang baik dapat terjadi karena adanya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif dan produktif, sehingga ini penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan, KNKG (2006). Konsep utama badan tata kelola dalam jangkauan luas didefinisikan sebagai jaringan hubungan yang tidak hanya mencakup perusahaan dan pemilikinya, tetapi juga semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, orang, masyarakat, dll (Sonntagbauer 2014). Selain itu terdapat 5 (lima) prinsip utama Good Corporate Governance yang diterapkan di Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan TARIF (Daniri 2006) yaitu keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), kemandirian (*Independency*), kewajaran (*Fairness*). Salah satu faktor tata kelola perusahaan yang baik yaitu pertanggungjawaban (*Responsibility*). Pertanggungjawaban merupakan kepatuhan perusahaan terhadap semua aturan yang berlaku seperti masalah perpajakm maupun memelihara lingkungan bisnis yang baik dan benar.

Di Indonesia tingkat kepatuhan perpajakannya masih terbilang tidak terlalu tinggi. Tingkat kepatuhan yang tidak terlalu tinggi dapat tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. Dari jumlah wajib pajak juga

belum optimal, baru 36.031.972 wajib pajak pada 2017, dengan rincian 2.922.612 WP Badan, 6.222.442 WP OP Non karyawan, dan 26.886.818 WP OP Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak pada 2017 yaitu Rp 480 triliun berupa PPN, Rp 208 triliun berupa PPh Badan, Rp 117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp 106 triliun berupa PPh Final, Rp 50 triliun berupa PPh Migas, Rp 16,7 triliun berupa PBB P3, Rp 7,8 triliun berupa PPh OP Non karyawan (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah>).

Hal tersebut diatas dapat disebabkan karena menurut perusahaan pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan pajak, sedangkan pajak sendiri merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan yang terjadi menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan melalui penghindaran pajak. Oleh karena itu masih banyak perusahaan yang menggunakan metode manajemen pajak ini.

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Persoalan penghindaran pajak adalah merupakan persoalan yang rumit dan juga unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saat melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Keputusan perpajakan didalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh para dewan direksi yang terdapat pada perusahaan tersebut. Menurut (Oyenike, Olayinka et al. 2016) menyatakan bahwa dewan direksi bertanggungjawab untuk

memastikan kredibilitas proses pelaporan keuangan dan informasi yang berkualitas untuk perhitungan kewajiban pajak serta memantau dan mengevaluasi manajemen untuk bertindak sebagai pemegang saham dengan tata kelola perusahaan yang efektif .

Di antara berbagai fungsi yang dilakukan dewan direksi, peran pengawasannya sangat penting bagi analis dan pembuat keputusan. Bahkan, mereka mengubah tindakan dan perilaku perusahaan dalam menanggapi lingkungan operasional perusahaan (seperti kebutuhan pasar dan tekanan kompetitif). Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan ukuran dewan dapat dikurangi dengan membuat keputusan dan melaksanakan tugas manajemen. Bahkan, dewan direksi dapat memainkan perannya secara efektif sehingga dapat dengan benar meninjau dan membatasi pandangan orang-orang yang memainkan peran kunci dalam keputusan dewan, karena jika tidak, ada beberapa pandangan karena ukuran dewan yang besar mengurangi efektivitas fungsional manajer dalam program dan strategi yang berbeda (Richardson dan Lanis, 2011, hal.53) bahwa penghindaran pajak meningkat jika ukuran papan meningkat. Dengan kata lain, kontrol dewan, jika dewan besar, ditempatkan oleh individu dan kelompok yang lebih berpengaruh, dan ini merupakan hambatan serius untuk memainkan peran dewan direksi. Dalam situasi ini, jika manajer ini memiliki tingkat penghindaran risiko yang lebih tinggi karena insentif kepentingan pribadi atau sejenisnya, mereka akan mengarahkan kebijakan dan strategi perusahaan ke titik yang mereka pertimbangkan.

Salah satu strategi ini adalah menghindari membayar pajak. Karena insentif pribadi, mereka cenderung membuat keputusan yang mengurangi pembayaran pajak melalui prosedur akuntansi dan adanya kesenjangan hukum. Bahkan, ukuran dewan direksi meningkatkan kemungkinan pengaruh dan pengaruh anggota dewan direksi, dan, berdasarkan teori representasi, kepentingan para pemegang saham dipertaruhkan dan kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak. Hoseini, Safari Gerayli et al. (2019) menyebutkan bahwa penghindaran pajak akan lebih meningkat jika ukuran dewan direksi juga meningkat. Penghindaran pajak juga dianggap sebagai salah satu kesenjangan

informasi yang sama antara eksekutif dan pemegang saham, dimana anggota dewan direksi dapat dengan keputusan mereka, dengan menghindari pajak, meningkatkan masalah dengan meningkatkan biaya representasi (Zahra dan Pearce 1989).

Selain itu, kehadiran perempuan di dewan perusahaan telah mendapatkan banyak sorotan karena peran efektif mereka dalam memantau kinerja manajerial. Direktur perempuan melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemegang saham. Banyak penelitian menyebutkan bahwa keberadaan direksi perempuan membuat dampak positif bagi perusahaan.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang berada di bawah kepemimpinan seorang wanita. Firma global Grant Thornton merilis laporan bertajuk *Women in Business 2018*, berdasarkan hasil survei terhadap 5.000 responden level *CEO/Managing Director/Eksekutif Senior* pada 35 negara, termasuk Indonesia. Dari laporan tersebut diketahui bahwa 43 persen wanita Indonesia dapat naik ke level manajemen senior di perusahaan. Angka tersebut merupakan angka tertinggi kedua di dunia, yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik yang berada di level 23 persen. Kiprah para wanita saat ini juga dapat dikatakan mengesankan karena hanya 15 persen perusahaan Indonesia yang tidak memiliki perempuan di posisi manajemen senior. Angka ini jelas lebih baik daripada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang 22 persen dan 21 persen perusahaan di sana tidak memiliki perempuan di level manajemen senior.

Keberadaan direktur wanita menurut Richardson, Taylor, & Lanis (2016) dapat memonitor perusahaan lebih baik. Dalam artian bahwa wanita dapat melihat resiko dari berbagai aspek organisasi bisnis lebih berhati-hati dibandingkan dengan pria. Wanita cenderung melakukan peninjauan resiko lebih serta detail dan akan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Representasi wanita dapat meningkat fungsi dan efisiensi dewan dan komite di perusahaan dan keberagaman gender pada jajaran eksekutif dapat mempengaruhi tingkah laku manajerial (Peni & Vahamaa, 2010).

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh (Hoseini, Gerayli, Valiyan, 2019) hasil penelitian menyebutkan selain ukuran dewan direksi perusahaan, adanya direksi wanita dalam perusahaan mempengaruhi semakin sedikitnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Lanis, Richardson, & Grantley (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam direksi dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Penelitian Richardson, Taylor, & Lanis, (2016) menyatakan bahwa keberadaan direksi wanita di suatu perusahaan dapat mengurangi kemungkinan agresivitas pajak perusahaan. Zemzem & Ftouhi (2013) dan (Boussaidi dan Hamed 2015) menyatakan bahwa keberagaman gender dalam dewan dapat menurunkan aktivitas penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian Khaoula (2012) yang menyatakan bahwa keberagaman gender dewan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang diukur dengan ETR. (Francis, Hasan et al. 2014) CFO wanita tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan untuk penelitian keberadaan direktur wanita terhadap agresivitas pajak masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti : Pengaruh Jumlah Direksi dan Keberadaan Direksi Wanita Terhadap Penghindaran Pajak

1.2. Kesenjangan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat kesenjangan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Hoseini dkk (2019) bahwa adanya perbedaan pada penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian tersebut dilakukan bukan di Indonesia melainkan di Tehran serta adanya perbedaan jangka waktu pengambilan sampel sehingga bisa saja terjadi perbedaan budaya, peraturan dan lain-lain.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah direksi dan keberadaan wanita sebagai direksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan metode analisis statistik. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah berikut :

1. Uji Asumsi Klasik
2. Analisis Regresi Berganda

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian

Dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa jumlah dewan direksi dan keberadaan direksi wanita berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 - 2017.

1.6. Kontribusi Riset

Kontribusi riset penelitian ini ditujukan bagi Direktorat Jendral Pajak supaya dapat memperketat undang – undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan celah bagi perusahaan – perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat lebih dimaksimalkan lagi. Penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya yang mempunyai hasil yang sama dengan penelitian ini dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini, sistematika penulisan meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi. Masalah yang dibahas adalah pengaruh jumlah direksi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak dan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan landasan teori yang berisikan penjabaran dari teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis dan yang sangat membantu peneliti dalam menganalisa hasil-hasil penelitian. Dalam bab ini juga berisikan hasil dari penelitian-penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka berfikir dari penelitian ini serta hipotesis yang dirumuskan dari pemikiran tersebut.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan diskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan. Bab ini berisikan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab ini juga akan membahas secara mendalam dan secara rinci hasil dari penelitian ini.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta berisikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.